

## Beri Kontribusi USD 721 Juta, Adaro Dapat Penghargaan Perpajakan



*republika.co.id*

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyerahkan penghargaan kepada Head of Tax Division PT Adaro Energy Tbk (Adaro), Jul Seventa Tarigan sebagai salah satu The Most Tax-Friendly Corporate pada acara Tempo Country Contributor Awards 2019.

Jul Seventa Tarigan mengatakan, sebagai perusahaan nasional, Adaro berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pajak dan royalti.

Dirjen Pajak juga telah mengukuhkan salah satu anak perusahaan yakni PT Adaro Indonesia sebagai WP Kriteria Tertentu (WP Patuh) untuk periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Seksama mengatakan, untuk memenuhi syarat sebagai WP Patuh, serangkaian kriteria aturan yang ketat dalam pelaporan pajak harus dipenuhi. Termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan laporan keuangan status wajar tanpa pengecualian<sup>1</sup> selama tiga tahun terakhir.

"Selain itu WP tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir," ucap Hestu Yoga.

### Sumber Berita:

Money.kompas.com, *Adaro Energy Raih Penghargaan Perpajakan* (<https://money.kompas.com/read/2019/11/18/162503326/adaro-energy-raih-penghargaan-perpajakan>), Senin, 18 November 2019.

merdeka.com, *Beri Kontribusi USD 721 Juta, Adaro Dapat Penghargaan Perpajakan dari Sri Mulyani*, (<https://www.merdeka.com/uang/beri-kontribusi-usd-721-juta-adaro-dapat-penghargaan-perpajakan-dari-sri-mulyani.html>), Senin, 18 November 2019.

## Catatan Berita:

### + Wajib Pajak

**Wajib Pajak**, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

**Wajib pajak Orang Pribadi** adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

**Wajib Pajak Badan**<sup>[1]</sup> yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara **Perpajakan, Badan** sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi:

1. Perseroan terbatas,
2. Perseroan komanditer,
3. Perseroan lainnya,
4. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
5. firma,
6. kongsi,
7. koperasi,
8. dana pensiun,
9. persekutuan,
10. perkumpulan,
11. yayasan,
12. organisasi massa,
13. organisasi sosial politik, atau
14. organisasi lainnya,
15. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib\\_pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak), diakses tanggal 6 Desember 2019)

---

<sup>1</sup> Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.